



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR : Kpts.159/II/2024

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian nomenkelatur jabatan pelaksana Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

COPY SESUAI ASLINYA
BIRO OKUPANISASI

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 45 tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);

COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- KEDUA** : Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempedomani Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau.
- KETIGA** : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga merupakan pedoman Perangkat Daerah untuk penataan kepegawaian dan penerapan sistem kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku :
- Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 7471/XI/2023 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 1891/XII/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 978/VI/2022;
 - Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 7472/XI/2023 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.1892/XII/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.1510/XII/2021;
 - Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7473/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.1512/XII/2021 tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
 - Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7474 /XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.1536/XII/2021 tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;
 - Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7475/XI/2023 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 985/VI/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.1542/XII/2021;
 - Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7621/XI/2023 tentang Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.979/VI/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.1509/XII/2021;

COPY SESUAI ASLINYA
BIRU OR KEMASASI

- g. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7622/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.1511/XII/2021 tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
- h. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7623/XI/2023 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.980/VI/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.1513/XII/2021;
- i. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7624/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.1514/XII/2021 tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Sosial Provinsi Riau;
- j. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7625/XI/2023 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.1893/XII/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.1515/XII/2021;
- k. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7626/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 1516/XII/2021 tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau;
- l. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7627/XI/2023 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1895/XII/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 1517/XII/2021;
- m. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7628/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1518/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;
- n. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7629/XI/2023 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : KPTS. 981/VI/2022 Tentang perubahan atas keputusan gubernur Nomor : KPTS. 1519/XII/2021;
- o. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7630/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1520/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau;
- p. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7631/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1521/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau;

COPY SESUAI ASLINYA
BIRU ORGANISASI

- q. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7632/XI/2023 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1896/XII/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 1522/XII/2021;
- r. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7633/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1523/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau;
- s. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7634/XI/2023 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1894/XII/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 1524/XII/2021;
- t. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7635/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1525/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau;
- u. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7636/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1526/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
- v. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7637/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1527/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau;
- w. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7638/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 1528/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
- x. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7639/XI/2023 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 1897/XII/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 1529/XII/2021;
- y. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7640/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1530/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau;
- z. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7641/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1531/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau;

COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

- aa. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7642/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1532/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau;
- ab. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7643/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1533/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau;
- ac. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7644/XI/2023 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1899/XII/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 1534/XII/2021;
- ad. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7645/XI/2023 tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
- ae. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7646/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1537/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau;
- af. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7647/XI/2023 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 982/VI/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1538/XII/2021;
- ag. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7648/XI/2023 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 984/VI/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1539/XII/2021;
- ah. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7649/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1540/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Badan Penghubung Provinsi Riau;
- ai. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7650/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1541/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau;

COPY SESUAI ASLINYA
BERKAS ORGANSASI

- aj. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7651/XI/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1543/XII/2021 Tentang Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Februari 2024

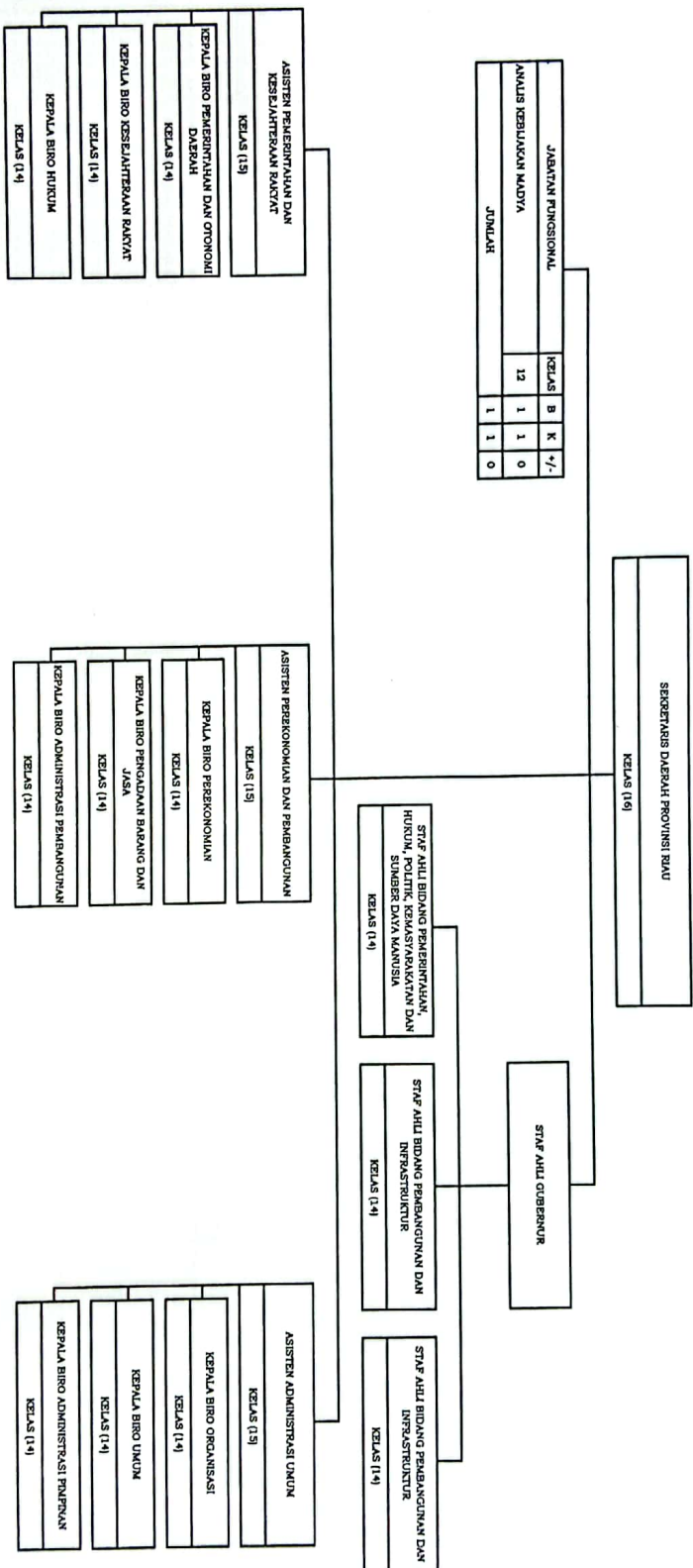


COPY SESUAI ASLINYA
BIDAN NASUTION

BIRO ORCAI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 159/II/2024
TANGGAL: 1 Februari 2024

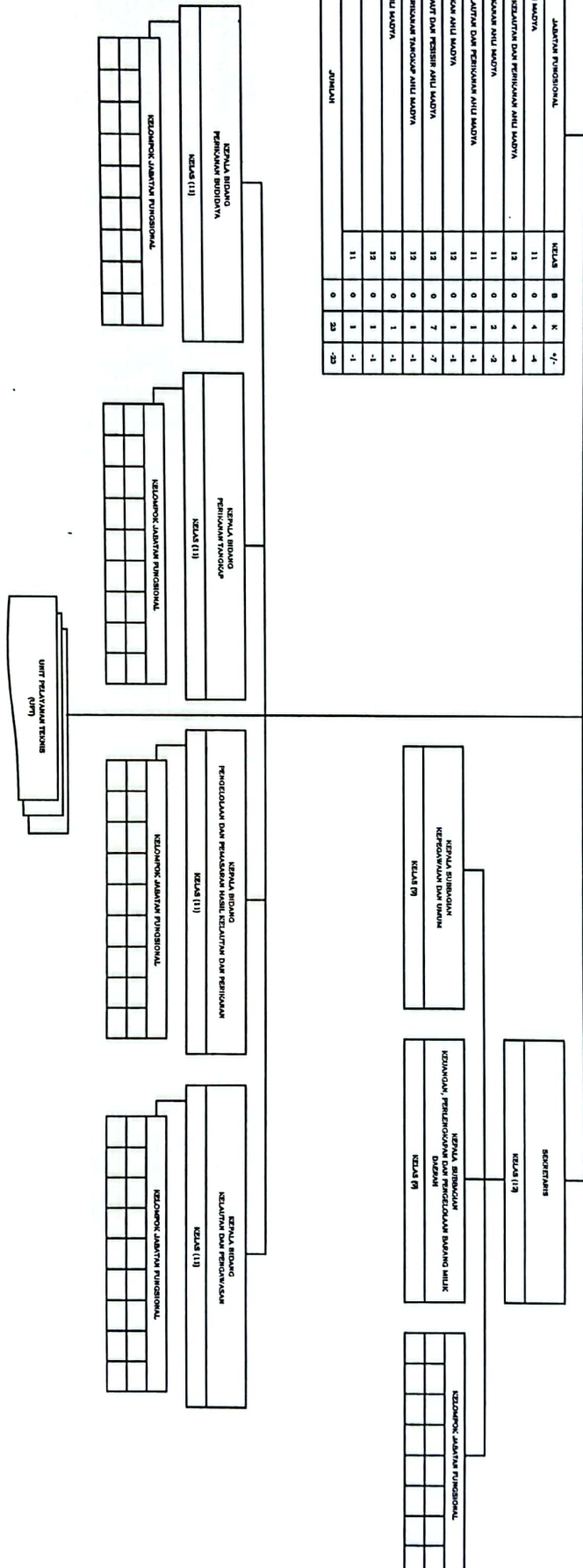
PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
A.SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU



COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

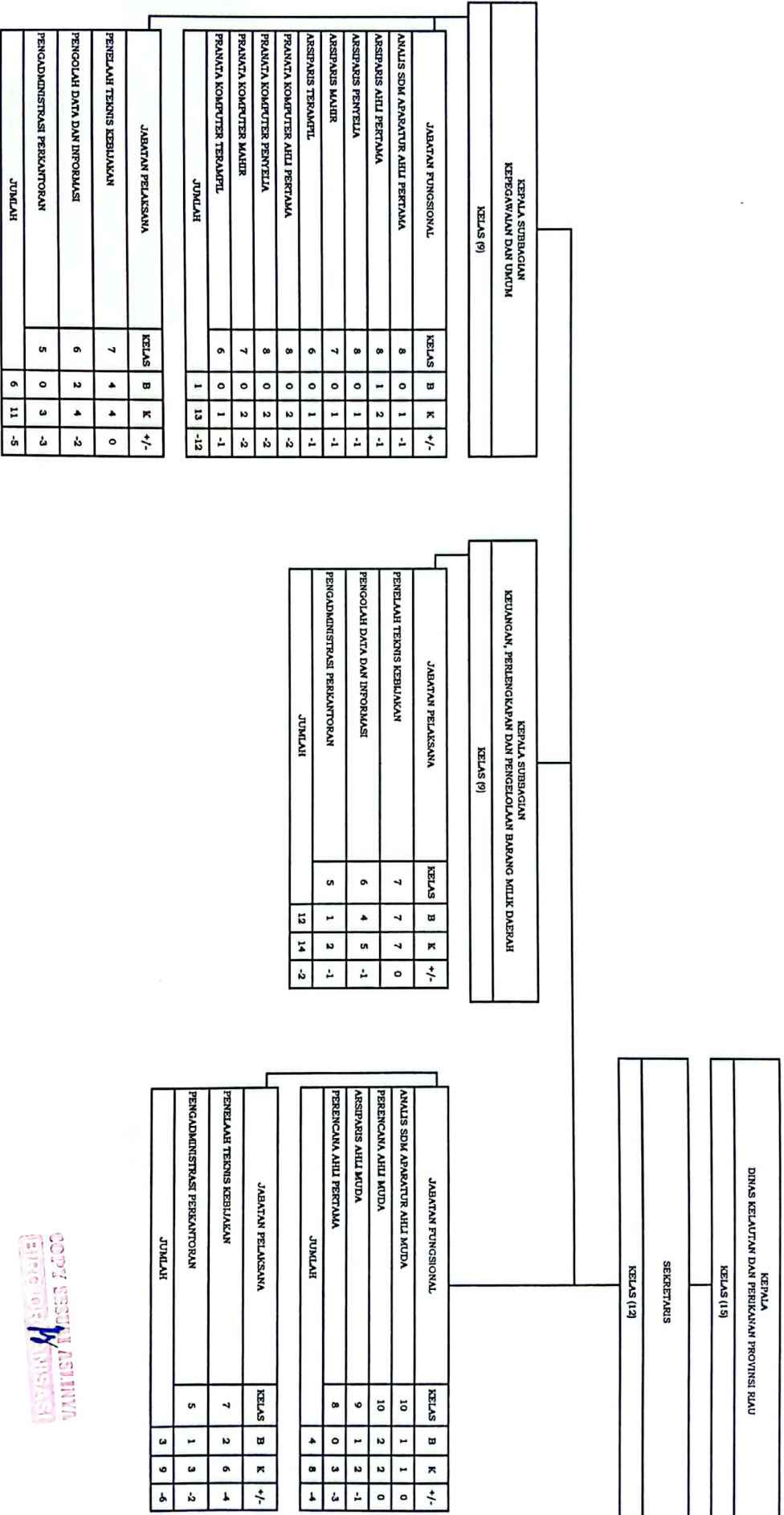
KEPUA	4
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	
KELAS (159)	

JENIS FUNGSIONAL	NILAI			
	B	K	X	Y
ANALIS KUALITAS DAN MUTU	11	0	4	-4
ANALIS PERFORMA, KUALITAS DAN PERILAKU DAN MUTU	13	0	4	-4
ANALIS RISIKO MANAJEMEN PERILAKU DAN MUTU	11	0	2	-2
PERILAKU MANAJEMEN KUALITAS DAN PERILAKU DAN MUTU	11	0	1	-1
PERILAKU KEBERHASILAN KUALITAS DAN MUTU	12	0	1	-1
PERILAKU EKSPERIMEN LAIN DAN PERILAKU DAN MUTU	13	0	7	-7
PERILAKU PROSES PERILAKU MANAJEMEN KUALITAS DAN MUTU	12	0	1	-1
PERILAKU PERILAKU DAN MUTU	12	0	1	-1
PERILAKU DAN MUTU	12	0	1	-1
PERILAKU DAN MUTU	11	0	1	-1
Jumlah	0	33	-20	



PROOF COPY

V.1. PETA JABATAN SEKRETARIAT



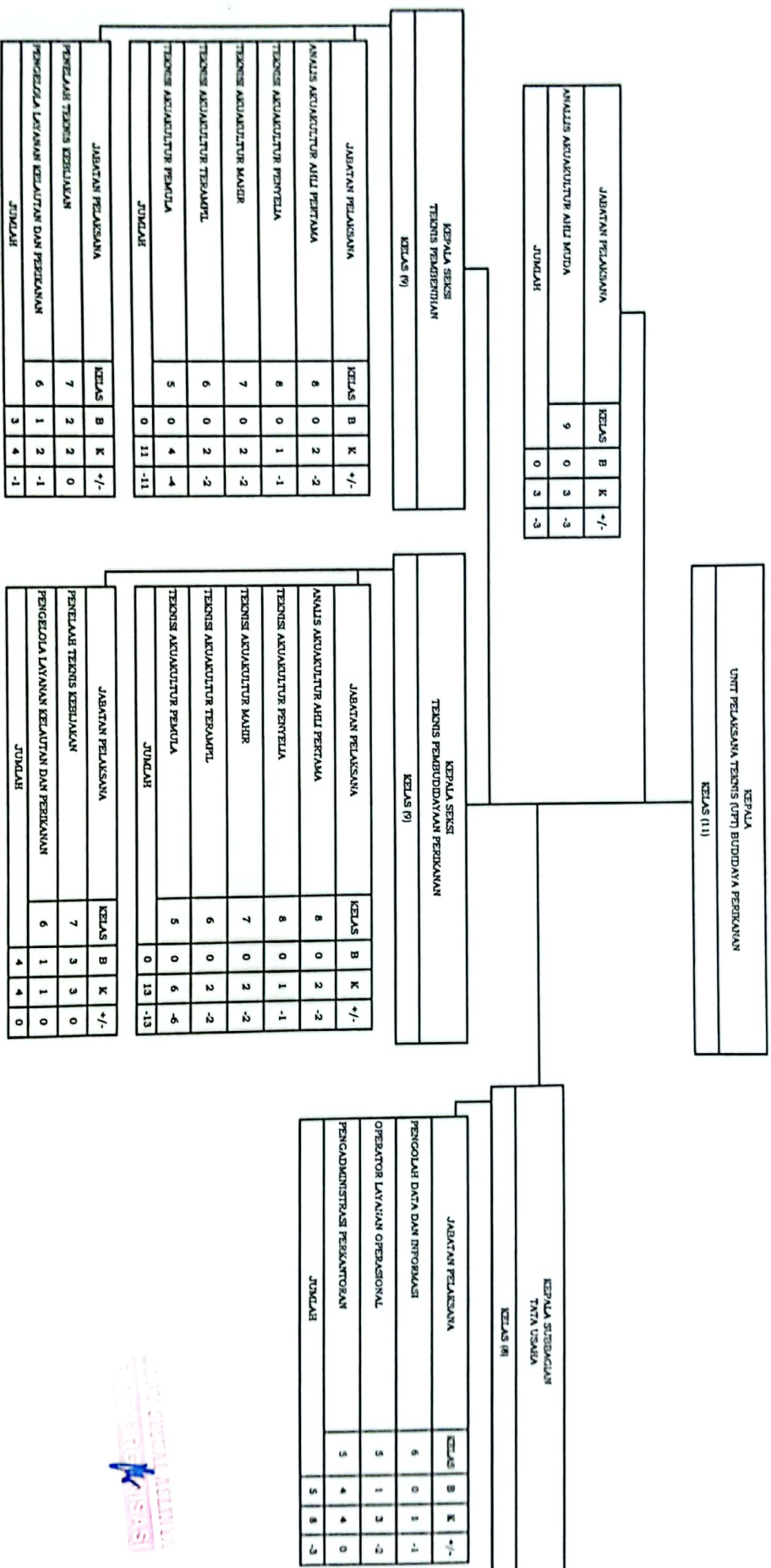
COPY SESUAI ASLINYA
BAGI ORG. MISASI

NEPALA
DIVAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTRES RIAU
KELAS I/19

ИДЕНТИФИКАЦИОНН.	ИЗДАШ	В	К	Г/Г
АНАЛИЗ ПЕРИОДАТА ДАТА ИЗДАВАНИЯ ДАТА ПЕРИОДА ИЛИ ИНОА	10	0	7	-7
ПРОДАВА ПЕРИОДА ИЛИ ИНОА	10	1	3	-1
ПЕРИОДА ИЗХОДИТЕЛ ЛУГ ДАТ ПЕРИОДА ИЛИ ПЕРИОДА	10	2	10	-4
АНАЛИЗ ПЕРИОДАТА ДАТА ИЗДАВАНИЯ ДАТА ПЕРИОДА ИЛИ ПЕРИОДА	0	0	9	-4
ПРОДАВА ПЕРИОДА ИЛИ ПЕРИОДА	0	1	2	-1
ПЕРИОДА ИЗХОДИТЕЛ ЛУГ ДАТ ПЕРИОДА ИЛИ ПЕРИОДА	0	1	11	-10
ПРОДАВА ПЕРИОДА ИЛИ ПЕРИОДА	7	0	1	-1
ПРОДАВА ПЕРИОДА ИЛИ ПЕРИОДА	6	0	1	-1
ПРОДАВА ПЕРИОДА ИЛИ ПЕРИОДА	5	43		-4

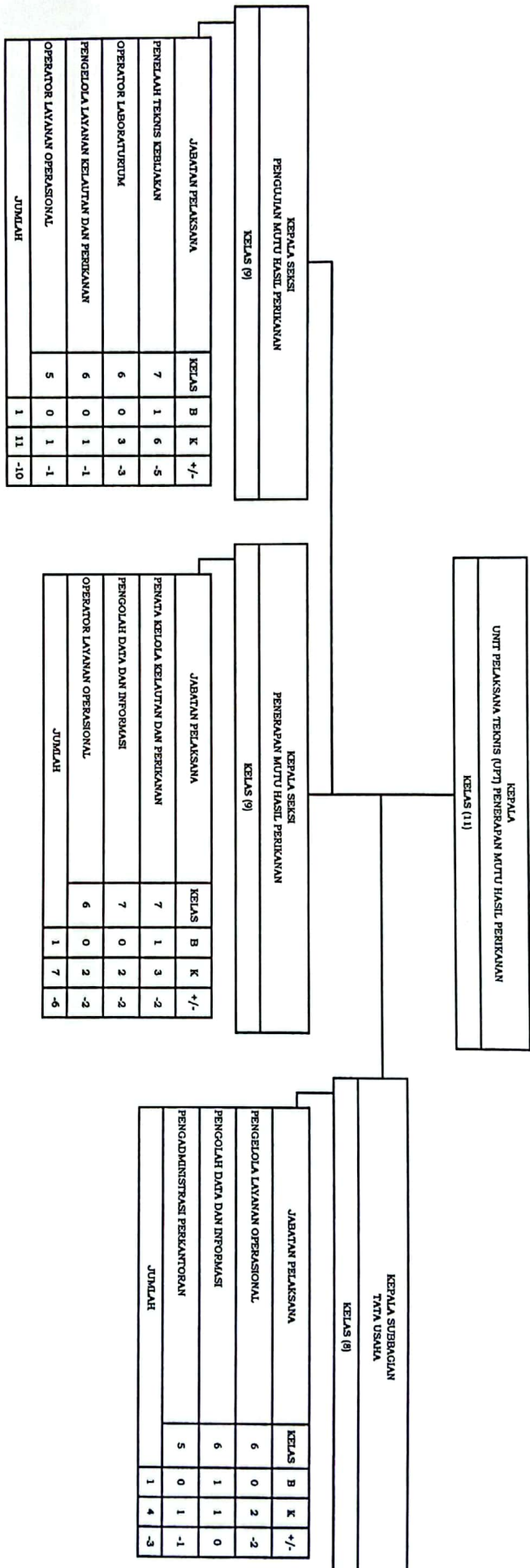
 Dipindai dengan CamScanner

V.3. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) BUDIDAYA PERIKANAN



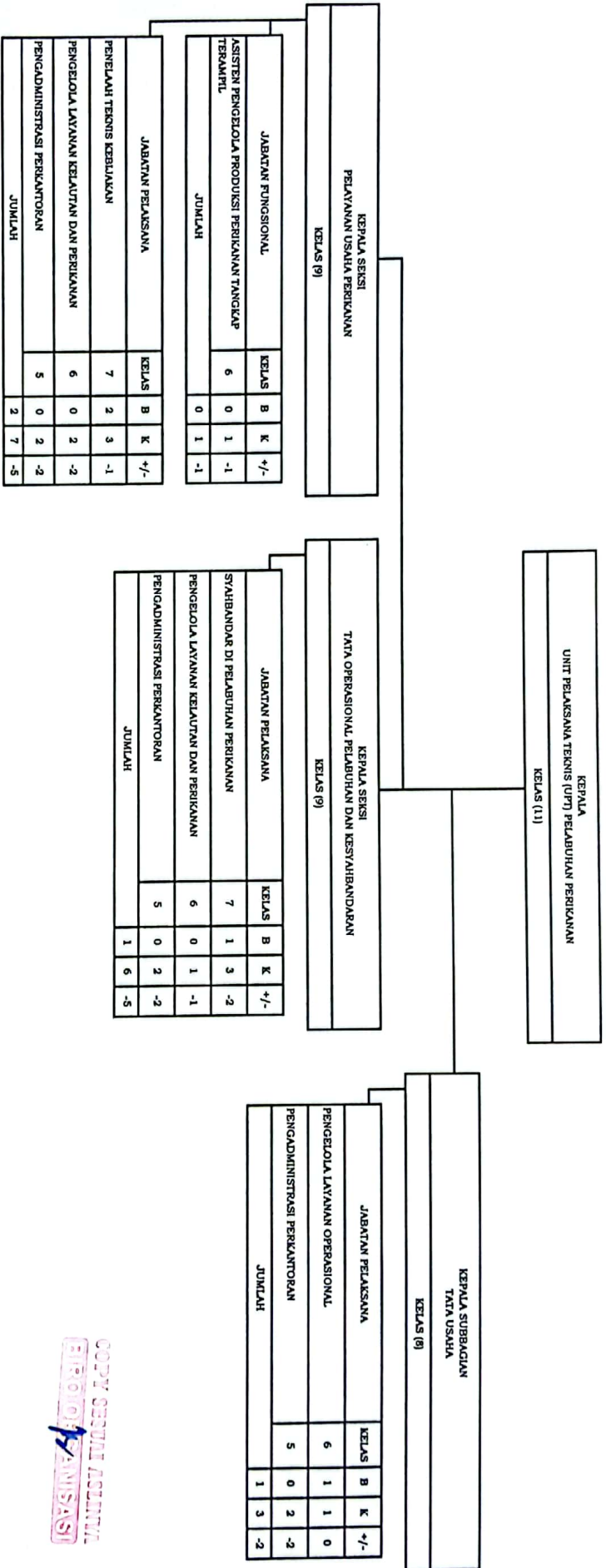
STAMP: UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) BUDIDAYA PERIKANAN

V.4. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN



COPY CEKUP ADMINITRA
SIPROKOR 10.05.2021

V.5. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) PELABUHAN PERIKANAN



COPY SESUAI ASLINYA
Birokrasi (PAMISASI)

V.6. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN WILAYAH I

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN WILAYAH I	
KELAS (11)	

JABATAN FUNSIONAL	KELAS	B	K	+/-
PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA	10	0	1	-1
JUMLAH	0	1	-1	

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
KELAS (9)	

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PEMANTA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	2	3	-1
PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	0	1	-1
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	1	-1
MAHKODA KAPAL KELAS V	5	0	1	-1
KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS V	5	0	1	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	0	2	-2
JUMLAH	2	9	-7	

KEPALA SEKSI KERJASAMA PENGAKSIAN HUKUM KELAUTAN DAN PERIKANAN	
KELAS (9)	

JABATAN FUNSIONAL	KELAS	B	K	+/-
PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA	8	0	2	-2
PENGAWAS PERIKANAN MAHIR	7	0	1	-1
PENGAWAS PERIKANAN TERAMPTIL	6	0	1	-1
JUMLAH	0	4	-4	

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENELAJAH TEKNIK KEBELAKUKAN	7	0	2	-2
PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	0	1	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	0	2	-2
JUMLAH	0	5	-5	

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	
KELAS (9)	

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	1	2	-1
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	1	1	0
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	0	1	-1
JUMLAH	2	4	-2	

COPY DOKUMEN INDIVIDUAL
BIDANG PERIKANAN

V.7. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPU) PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN WILAYAH II

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPU) PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN WILAYAH II			
KELAS (11)			

JABATAN FUNGSIONAL	KELAS		
	B	K	+/-
PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA	10	0	-1
JUMLAH	0	1	-1

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
KELAS (9)			

JABATAN PELAKSANA	KELAS		
	B	K	+/-
PEKATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	1	-2
PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	0	-1
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	-1
NAHKODA KAPAL KELAS V	5	0	-1
KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS V	5	0	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	0	-2
JUMLAH	1	9	-8

KEPALA SEKSI KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM KELAUTAN DAN PERIKANAN			
KELAS (9)			

JABATAN FUNGSIONAL	KELAS		
	B	K	+/-
PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA	8	1	-1
PENGAWAS PERIKANAN MAHIR	7	0	-1
PENGAWAS PERIKANAN TERAMPL	6	0	-1
JUMLAH	1	4	-3

JABATAN PELAKSANA	KELAS		
	B	K	+/-
PENJELAH TEKNIK KEBUJUKAN	7	0	-2
PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	0	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	0	-2
JUMLAH	0	5	-5

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA			
KELAS (9)			

JABATAN PELAKSANA	KELAS		
	B	K	+/-
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	0	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	-1
JUMLAH	1	3	-2

COPY SESUAL ASLINYA
BIBLIOTHECA
(SAS)

V.8. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN WILAYAH III

KEPALA	
UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN WILAYAH III	
KELAS (11)	

JABATAN FUNSIONAL	KELAS	B	K	+/-
PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA	10	0	1	-1
JUMLAH		0	1	-1

KEPALA SEKSI	
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
KELAS (9)	

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PEMATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	3	3	0
PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	0	1	-1
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	1	-1
NAIKKODA KAPAL KELAS V	5	0	1	-1
KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS V	5	0	1	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	0	2	-2
JUMLAH		3	9	-6

KEPALA SEKSI	
KERJASAMA PEMERINTAH HUKUM KELAUTAN DAN PERIKANAN	
KELAS (9)	

JABATAN FUNSIONAL	KELAS	B	K	+/-
PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA	8	0	2	-2
PENGAWAS PERIKANAN MAHIR	7	0	1	-1
PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL	6	0	1	-1
JUMLAH		0	4	-4

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENELAAH TEKNIK KEBUJUKAN	7	1	2	-1
PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	0	1	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	0	2	-2
JUMLAH		1	5	-4

KEPALA SUBBAGIAN	
TATA USAHA	
KELAS (9)	

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	0	1	-1
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	1	1	0
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	2	-1
JUMLAH		2	4	-2

COPY SEBUT ASLINYA
BIBLIOGRAFI

AJ.2. PETA JABATAN SUBBIDANG PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU

KEPALA
BADAN PENGHUBUNG
KELAS (12)

KEPALA SUBBIDANG PENGELOMAN ANUNGAN EMU
KELAS (9)

KEPALA SUBBIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMAGA
KELAS (9)

KEPALA SUBBIDANG ETIMAS DAN PROTOKOL
KELAS (9)

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENYELAR TEKNIK KEBELAKAN	7	3	4	-1
PASITATOR PERDAMANGAN	7	2	2	0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	2	-1
PENGADMINISTRASI PERANTORAN	5	2	2	0
JUDLAR	7	10	-2	

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENYELAR TEKNIK KEBELAKAN	7	2	4	-1
PASITATOR PERDAMANGAN	7	2	2	0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	2	-1
PENGADMINISTRASI PERANTORAN	5	1	1	0
JUDLAR	5	9	-2	

JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K	+/-
PRANATA ETIMAS AHLI PERCEKAMA	8	0	1	-1
PRANATA ETIMAS PELAKSANA LANUTAN	7	0	1	-1
PRANATA ETIMAS PELAKSANA	6	0	1	-1
JUDLAR	0	3	-3	
JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENYELAR TEKNIK KEBELAKAN	7	3	3	0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	1	4	-3
PENGOLAH KEBROTOKOLAN	5	1	5	-4
PENGADMINISTRASI PERANTORAN	5	2	2	0
JUDLAR	7	14	-7	

COPY SESUAI ASLINYA
BIBLIOTHEKA

EDY NASUTION